



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DIREKTORAT KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640
Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421
Laman: bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

Nomor : 127/B-BM.01.01/UE/C/2023 Jakarta, 3 Maret 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Undangan Rekonsiliasi Unor

Kepada Yth.

1. Kepala Biro SDM/ Kepegawaian Instansi Pusat
2. Kepala BKD/BKPSDM/BKPP
(terlampir)

di

Tempat

Dalam rangka pelaksanaan penerapan Sistem Informasi e-Kinerja ASN Terintegrasi pada K/L/D sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN, Direktorat Kinerja ASN bersama dengan Direktorat Pembangunan dan Pengembangan SIASN membangun aplikasi e-kinerja BKN.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai persiapan implementasi aplikasi e-kinerja secara menyeluruh pada Istansi Pemerintah, Direktorat Kinerja ASN akan menyelenggarakan Rekonsiliasi Unor secara virtual pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 07 Maret 2023

Pukul : 13.30 WIB – selesai

Media : *Zoom Meeting*

Meeting ID : 983 3336 0540

Passcode : rekon23

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Saudara/i untuk hadir bersama **Admin aplikasi kinerja, Admin SIASN, Admin SAPK & HR dan Pejabat/Pegawai**

yang menangani pengelolaan/fasilitasi kinerja PNS sebagai peserta Rekonsiliasi Unor dimaksud melalui media *Zoom Cloud Meeting* dengan maksimal 5 (lima) akun.

Dalam hal Instansi ingin menggunakan aplikasi e-kinerja BKN namun belum menunjuk pegawai yang akan ditugaskan sebagai admin aplikasi kinerja, maka diharapkan Instansi dapat mengajukan surat penunjukan admin kepada BKN dengan mengisi tautan berikut ini: <https://bit.ly/PERMOHONANEKINERJA>.

Untuk informasi lebih lanjut terkait kegiatan Rekonsiliasi Unor, dapat menghubungi Sdri. Fitria Dewi (0878-4761-6464) atau Sdr. Ario (0822-7843-3644).

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara/i kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 3 Maret 2023

Deputi Bidang

Pembinaan Manajemen Kepegawaian,

\$

Lampiran Surat Deputi Bidang PMK
Nomor: 127/B-BM.01.01/UE/C/2023
Tanggal: 3 Maret 2023

**DAFTAR INSTANSI UNDANGAN REKONSILIASI UNOR
TANGGAL 7 MARET 2023**

NO	INSTANSI PEMERINTAH	WILAYAH KERJA
1	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	INSTANSI PUSAT
2	Kementerian Pertahanan	
3	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
4	Kejaksaan Agung	
5	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	
6	Kementerian Pertanian	
7	Badan Pusat Statistik	
8	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
9	Badan Pemeriksa Keuangan	
10	Kementerian Dalam Negeri	
11	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	
12	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	
13	Kementerian Perindustrian	
14	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	
15	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	
16	Kementerian Ketenagakerjaan	
17	Kementerian Perdagangan	
18	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
19	Lembaga Administrasi Negara	
20	Perpustakaan Nasional RI	
21	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	
22	Arsip Nasional Republik Indonesia	

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

23	Badan Keamanan Laut RI	
24	Setjen Dewan Perwakilan Daerah	
25	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	
26	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	
27	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	
28	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	
29	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	
30	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	
31	Ombudsman Republik Indonesia	
32	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	
33	Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	
34	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	
35	Komisi Aparatur Sipil Negara	
36	Setjen Komisi Pengawas Persaingan Usaha	
37	Komisi Pemberantasan Korupsi	
38	Badan Pangan Nasional	
1	Pemerintah Kab. Banyumas	WILAYAH KERJA KANTOR REGIONAL I YOGYAKARTA
2	Pemerintah Kab. Kebumen	
3	Pemerintah Kab. Cilacap	
4	Pemerintah Kab. Pati	
5	Pemerintah Kab. Wonogiri	
6	Pemerintah Kab. Tegal	
7	Pemerintah Kab. Karanganyar	
8	Pemerintah Kab. Sleman	
9	Pemerintah Kab. Sragen	
10	Pemerintah Kab. Pekalongan	
11	Pemerintah Kab. Grobogan	
12	Pemerintah Kab. Boyolali	
13	Pemerintah Kab. Kendal	

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

14	Pemerintah Kab. Banjarnegara	
15	Pemerintah Kab. Jepara	
16	Pemerintah Kab. Sukoharjo	
17	Pemerintah Kab. Blora	
18	Pemerintah Kab. Purbalingga	
19	Pemerintah Kab. Kudus	
20	Pemerintah Kab. Demak	
21	Pemerintah Kab. Wonosobo	
22	Pemerintah Kab. Temanggung	
23	Pemerintah Kab. Batang	
24	Pemerintah Kab. Rembang	
25	Pemerintah Kota Surakarta	
26	Pemerintah Kota Yogyakarta	
27	Pemerintah Kota Tegal	
28	Pemerintah Kota Salatiga	
29	Pemerintah Kota Magelang	
1	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	WILAYAH KERJA KANTOR REGIONAL III BANDUNG
2	Pemerintah Kab. Bogor	
3	Pemerintah Kab. Bandung	
4	Pemerintah Kab. Garut	
5	Pemerintah Kab. Sukabumi	
6	Pemerintah Kab. Tasikmalaya	
7	Pemerintah Kab. Subang	
8	Pemerintah Kab. Cianjur	
9	Pemerintah Kab. Indramayu	
10	Pemerintah Kab. Karawang	
11	Pemerintah Kota Bekasi	
12	Pemerintah Kab. Sumedang	
13	Pemerintah Provinsi Banten	

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

14	Pemerintah Kab. Ciamis	
15	Pemerintah Kab. Bandung Barat	
16	Pemerintah Kab. Purwakarta	
17	Pemerintah Kota Bogor	
18	Pemerintah Kota Tasikmalaya	
19	Pemerintah Kota Depok	
20	Pemerintah Kota Cilegon	
21	Pemerintah Kota Sukabumi	
22	Pemerintah Kota Banjar	
1	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	WILAYAH KERJA KANTOR REGIONAL V JAKARTA
2	Pemerintah Kab. Lampung Tengah	
3	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	
4	Pemerintah Kab. Lampung Timur	
5	Pemerintah Kab. Ketapang	
6	Pemerintah Kab. Sambas	
7	Pemerintah Kab. Sintang	
8	Pemerintah Kab. Kubu Raya	
9	Pemerintah Kab. Way Kanan	
10	Pemerintah Kab. Sanggau	
11	Pemerintah Kab. Kapuas Hulu	
12	Pemerintah Kab. Pringsewu	
13	Pemerintah Kab. Landak	
14	Pemerintah Kab. Bengkayang	
15	Pemerintah Kab. Lampung Barat	
16	Pemerintah Kab. Mempawah	
17	Pemerintah Kota Metro	
18	Pemerintah Kab. Melawi	
19	Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat	
20	Pemerintah Kab. Sekadau	

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

21	Pemerintah Kab. Pesisir Barat	
22	Pemerintah Kab. Mesuji	
23	Pemerintah Kab. Kayong Utara	

-
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat1
 - "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR